

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah menegaskan bahwa pembangunan dan prestasi suatu negara di panggung dunia secara substansial bergantung pada kemajuan sektor pendidikan. Kondisi ketidakpahaman dianggap sebagai kendala utama yang dapat menghambat kemajuan dan kejayaan sebuah bangsa. Oleh karena itu, diperlukan sebuah perubahan besar dalam bidang pendidikan, suatu revolusi pendidikan, sebagai respons terhadap tantangan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat. Transformasi mendalam ini diperlukan untuk merespons dinamika global dan memastikan bahwa masyarakat dapat mengatasi kompleksitas perubahan zaman demi mencapai kemajuan berkelanjutan dan keunggulan nasional.¹ Pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang yang memperkaya potensi sumber daya manusia, memiliki nilai strategis yang tidak hanya mencakup dimensi individu, tetapi juga memberikan dampak signifikan pada kelangsungan peradaban manusia secara global.

¹ Kunandar, *Guru Professional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 8.

Hampir seluruh negara mengakui pentingnya pendidikan sebagai pilar fundamental dalam pembangunan nasional dan kemajuan negara. Pendidikan dianggap sebagai fondasi kritis yang tidak hanya membentuk karakter dan kompetensi individu, tetapi juga menjadi kekuatan penggerak untuk inovasi, kemajuan teknologi, serta integrasi global. Melalui pendidikan, sebuah masyarakat dapat mengembangkan potensi kreatifnya, memperluas wawasan, dan memajukan nilai-nilai kemanusiaan, semuanya berkontribusi pada evolusi positif peradaban manusia dalam skala yang lebih luas.

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menegaskan kepentingan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pilar utama dalam mengarahkan pembangunan nasional. Pasal 31 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945”memberikan tugas yang tegas kepada pemerintah untuk secara aktif mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan ini, yang diarahkan untuk meningkatkan iman, ketakwaan, dan akhlak mulia, bukan hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga memainkan peran strategis dalam membentuk karakter serta memperkuat identitas nasional. Dalam hal ini, pengaturan sistem pendidikan nasional menjadi sangat penting dan diwujudkan melalui kerangka hukum yang ditetapkan oleh undang-undang, menggarisbawahi

komitmen negara untuk mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui landasan hukum yang kokoh dan berkelanjutan.

Undang-undang yang mengatur sistem pendidikan nasional telah mengalami transformasi melalui sejumlah perubahan sejalan dengan perjalanan waktu. Pendidikan nasional dipertikan sebagai komponen integral dari Process pembangunan nasional yang bertujuan lebih dari sekadar peningkatan pengetahuan; ia juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Visi utama yang terkandung dalam kerangka hukum ini melibatkan penciptaan sistem pendidikan yang bukan hanya menjadi suatu lembaga formal, tetapi juga menjadi pranata sosial yang kokoh dan dihormati. Sasaran utamanya adalah memberdayakan seluruh warga negara Indonesia, dengan tujuan menghasilkan individu yang tidak hanya berkualitas tinggi dalam aspek akademis, tetapi juga mampu secara proaktif dan kreatif menghadapi dinamika perubahan zaman yang terus menerus. Dengan demikian, “Undang-undang tentang sistem pendidikan nasional” tidak hanya mencakup peraturan formal, tetapi juga mencerminkan semangat untuk menciptakan fondasi pendidikan yang adaptif dan berdaya guna dalam mendukung kemajuan dan perkembangan masyarakat.

“Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan” Nasional mengukuhkan konsep manusia berkualitas sebagai

individu yang terdidik, yang tidak hanya memiliki keimanan kepada Allah SWT, tetapi juga diberdayakan untuk membentuk akhlak mulia, menjaga kesehatan, mengembangkan ilmu pengetahuan, memupuk kreativitas, mandiri, dan menjadi warga negara yang baik. Undang-undang ini memberikan landasan filosofis yang mendalam mengenai tujuan utama pendidikan nasional, “yaitu menciptakan manusia yang bukan hanya cakap secara intelektual, tetapi juga berkualitas dalam segala aspek kehidupan”.²

Dengan demikian, peran pendidikan nasional diartikan sebagai wahana utama dalam upaya pembangunan bangsa, melampaui sekadar mentransfer pengetahuan. Penyelenggaraan pendidikan diharapkan tidak hanya memenuhi tuntutan undang-undang, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan kualitas pribadi peserta didik. Pendidikan diarahkan untuk merangsang Process pematangan karakter, kemandirian, dan tanggung jawab, mempersiapkan generasi penerus bangsa yang terampil, dan memiliki integritas moral dan kemampuan untuk berkontribusi positif pada masyarakat. Keberhasilan pendidikan, sejalan dengan visi Undang-undang tersebut, dianggap sebagai faktor kunci dalam pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia, menciptakan fondasi kuat bagi kemajuan negara dalam

² Depdiknas, *UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Republik Indonesia, 2003), 3.

Context sejarah yang panjang. Dengan demikian, pembentukan manusia berkualitas melalui pendidikan dianggap sebagai investasi jangka panjang yang krusial bagi masa depan bangsa dan negara.

Dari beragam unsur sumber daya yang membentuk landasan pendidikan, kurikulum diakui sebagai salah satu elemen yang memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan kualitas potensi peserta didik. Kurikulum, yang dibangun berdasarkan konsep kompetensi, memegang peran sentral sebagai instrumen utama untuk membimbing peserta didik dalam mencapai berbagai dimensi keunggulan dan kepribadian yang diinginkan. Oleh karena itu, pengakuan akan peran krusial kurikulum tidak bisa diabaikan. Kurikulum, sebagai pedoman intelektual dan moral, diarahkan untuk menciptakan peserta didik yang bukan hanya mampu merespons dinamika perubahan zaman, tetapi juga menjadi individu yang berkualitas dalam arti yang lebih luas.

Tujuan kurikulum mencakup pembentukan individu yang baik secara intelektual, serta memiliki keimanan yang kuat, berakhlak mulia, menjaga kesehatan, berilmu, kreatif, dan mandiri. Selain itu, kurikulum juga berperan dalam membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik. Dengan demikian, peran kurikulum sebagai instrumen pendidikan mengarahkan peserta didik menuju perkembangan holistik yang

melibatkan aspek kognitif, moral, dan sosial. Kurikulum, sebagai dasar bagi Process belajar-mengajar, dianggap sebagai pilar utama dalam membentuk generasi masa depan yang dapat memberikan kontribusi positif pada masyarakat dan menghadapi perubahan global dengan penuh kepercayaan diri.

Dalam kerangka Sistem Pendidikan Nasional, penjabaran mengenai tujuan tersebut diperinci dalam hal SKL Jenjang Pendidikan Menengah Umum. Fokus utama dalam pembentukan kompetensi lulusan ini mencakup tiga aspek esensial : a. Persiapan Peserta Didik Menjadi Anggota Masyarakat Berkualitas; Melibatkan Process pembentukan individu yang tidak hanya memiliki keyakinan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga ditanamkan dengan akhlak mulia. Mendorong pembentukan karakter yang tinggi dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral yang kuat. Mengarahkan peserta didik untuk aktif berkontribusi sebagai anggota masyarakat yang peduli, beretika, dan bertanggung jawab. b. Penanaman Karakter Sesuai dengan Nilai-nilai Pancasila; Menekankan pada pentingnya penanaman karakter yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis negara. Memprioritaskan pembentukan peserta didik yang memiliki sikap patriotisme, gotong royong, adil, dan demokratis. Memberikan pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai luhur Pancasila sebagai panduan dalam

berinteraksi dalam masyarakat. c. Penyediaan Pengetahuan untuk Meningkatkan Kompetensi Peserta Didik ; Menawarkan pembelajaran yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Memberikan dasar pengetahuan yang kokoh sebagai landasan bagi peserta didik untuk hidup mandiri. Mengarahkan peserta didik untuk mengejar pendidikan lebih lanjut, sehingga dapat terus mengembangkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan demikian, rumusan tujuan tersebut tidak hanya mencakup aspek keagamaan dan moral, tetapi juga menekankan pentingnya pembentukan karakter, nilai-nilai Pancasila, dan pengembangan pengetahuan sebagai fondasi untuk kemajuan peserta didik dalam menghadapi tantangan kehidupan dan pendidikan lebih lanjut.³

Pendidikan memegang peran yang esensial dalam membentuk karakter individu dan menggerakkan perkembangan masyarakat. Di Indonesia, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) menjadi salah satu lembaga pendidikan menengah yang memiliki peran penting dalam menyediakan pendidikan berkualitas bagi siswa muslim. Pemerintah Indonesia, dalam

³ Presiden RI, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022* (RI, 2022), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/196151/pp-no-4-tahun-2022>.

upaya untuk terus meningkatkan mutu pendidikan, telah menerapkan sejumlah reformasi pendidikan, termasuk pengenalan Kurikulum Merdeka.

Prinsip pelaksanaan pendidikan Islam didasarkan pada ajaran syariat Islam, yang mencakup Al-Quran, Sunnah, ijtihad ulama, dan warisan sejarah Islam. Tujuan pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada transfer budaya atau pengetahuan, tetapi juga melibatkan penanaman nilai-nilai ajaran Islam. Pendidikan ini bertujuan untuk mencapai kesuksesan di dunia dan akhirat. Mengingat pentingnya pendidikan, baik secara umum maupun khususnya pendidikan Islam, perlu adanya penerapan yang terus-menerus diperbaiki.

Dalam Context manajemen, salah satu fungsi yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan adalah penerapan atau aktualisasi nilai-nilai pendidikan Islam oleh para pelaku pendidikan. Agar pelaksanaan pendidikan berjalan sesuai rencana, diperlukan kematangan dan kesiapan dari semua anggota stakeholder pendidikan. Pentingnya fungsi aktuasi atau pelaksanaan ini bahkan dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Banyak literatur Islam yang menjadi rujukan utama dalam hal ini, membahas salah satu fungsi manajemen yaitu aktuasi atau pelaksanaan.⁴

Salah-satunya firman Allah Swt. dalam Q.S. Al'alaq ayat 1-5 berikut :

⁴ Q Abusama, S Asiah, and Z Yasin, "Actuating Pendidikan Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadits," *Jurnal Al ...* 4, no. 1 (2020): 298–310, <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/2125>.

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ ۱ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ ۲ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ ۳
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ ۴ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ ۵

Artinya: “1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, 2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3) Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Mahamulia, 4) Yang mengajar (manusia) dengan pena. 5) Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.”

Perintah untuk membaca (iqra) dalam surat Al-Alaq muncul dua kali sebagai perintah pertama kepada Rasulullah SAW dan selanjutnya kepada seluruh umatnya. Membaca dianggap sebagai sarana untuk belajar dan sebagai kunci untuk memperoleh pengetahuan. Secara etimologis, membaca dapat diartikan dalam arti sempit, yaitu membaca kata demi kata dari huruf-huruf yang tertulis pada buku atau kitab. Namun, secara terminologis, membaca memiliki makna yang lebih kompleks, melibatkan pengamatan, telaah, penelitian, dan observasi terhadap alam semesta (ayat al-kauniyah). Selanjutnya, kata "kalam" pada ayat tersebut menjelaskan bahwa iqra yang sejati adalah membaca dalam arti sempit, atau membaca yang tertulis. Surah Al-Kalam, yang termasuk dalam golongan surah-surah awal dan diturunkan oleh Allah SWT, bersumpah dengan kata "kalam" ini, menunjukkan kepentingan besar dalam Context dunia.⁵

⁵ Siti Solekha Masykur, "Tafsir Qur'an Surah Al-'Alaq Ayat 1 Sampai 5," *Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 2 (2021): 73–74, <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/wasathiyah/article/view/123/95>.

Ayat pertama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca tanpa membatasi objek yang harus dibaca. Dalam ayat "Iqra bi ismi rabbik," Allah dengan sengaja tidak menyebutkan objek (maf'ul bih) yang harus dibaca. Hal ini mengindikasikan bahwa Allah memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada manusia untuk membaca dan mempelajari apapun yang mereka inginkan. Yang penting, Process membaca dan pembelajaran tersebut harus dilakukan dalam rangkaian bingkai "bi ismi Rabbik," yaitu atas nama Allah, dengan niat baik, dan dengan harapan untuk meraih ridha Allah SWT.

Istilah kurikulum seringkali ditemui dan digunakan dalam berbagai kegiatan pendidikan. Kurikulum memainkan peran yang sangat vital bagi individu dalam Context pendidikan, karena seharusnya berfungsi sebagai panduan pencapaian pendidikan. Salah satu tujuan kurikulum adalah membantu peserta didik dalam persiapan masa depan mereka, agar mereka dapat menjadi individu yang memiliki keterampilan tinggi, kemampuan nalar, serta mampu berpikir kritis dan kreatif untuk diterapkan di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan

kurikulum menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan Process pendidikan itu sendiri.

Dalam Kurikulum 2013 (K13), kompetensi diuraikan menjadi tiga komponen yang berbeda, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dampaknya, Process penilaian oleh guru menjadi kompleks dan memerlukan usaha ekstra karena perbedaan-perbedaan tersebut. Tujuan pembelajaran dalam K13 dianggap terlalu tinggi, tidak sesuai dengan tahap perkembangan anak, sehingga dianggap tidak relevan dan tidak realistis. Hal ini menyebabkan kurangnya ruang kreativitas bagi guru karena harus terfokus pada satu arah pengajaran, yang kemudian menuntut peserta didik untuk mempelajari banyak konten dan hasil pembelajaran yang lebih bersifat hafalan daripada pemahaman menyeluruh.

Dengan adanya berbagai kelemahan pada kurikulum sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim merancang Kurikulum Merdeka. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi krisis belajar yang telah lama dihadapi dan semakin parah seiring dengan munculnya pandemi Covid-19. Krisis ini ditandai oleh rendahnya hasil belajar peserta

didik, termasuk dalam hal literasi membaca yang menjadi masalah mendasar. Kebijakan merdeka belajar diimplementasikan sebagai langkah untuk mentransformasi sistem pendidikan, dengan tujuan menciptakan sumber daya manusia unggul di Indonesia yang memenuhi profil pelajar Pancasila.

Meskipun demikian, penerapan Kurikulum Merdeka tidak diterapkan secara langsung di setiap sekolah, melainkan mengacu pada kesiapan masing-masing sekolah. Setiap sekolah diberikan kebebasan untuk memilih kurikulum yang sesuai, baik itu Kurikulum Merdeka, Kurikulum Prototipe, atau Kurikulum Merdeka. Salah satu keunggulan dari Kurikulum Merdeka adalah memberikan keleluasaan kepada guru dalam mengembangkan Process pembelajaran, baik dalam pemilihan perangkat ajar maupun melalui proyek penguatan materi ajar. Pendekatan ini lebih fokus pada materi yang esensial, memungkinkan pembelajaran yang lebih mendalam dan tidak terburu-buru, serta memberikan kebebasan khusus di jenjang SMA sederajat dengan menghilangkan program peminatan. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasinya. Selain itu, Kurikulum Merdeka dianggap lebih relevan dan interaktif.⁶

⁶ Elza Astari Retaduari, "Ini Beda Kurikulum Merdeka Dengan Kurikulum Sebelumnya Bagi Anak SMA," *Nasional.Kompas.Com*, last modified 2022, 1.

Perbedaan utama dari Kurikulum Merdeka yang diterapkan di SMA sederajat dengan kurikulum sebelumnya terletak pada penyusunan capaian belajar yang disusun per fase daripada per Kompetensi Dasar (KD). Selain itu, mata pelajaran IPA dan IPS belum dipisahkan dengan lebih spesifik. Dalam Kurikulum Merdeka, peserta didik memiliki kebebasan untuk memilih satu dari lima mata pelajaran yang ditawarkan. Pada kelas X, peserta didik akan mempelajari mata pelajaran umum, sedangkan pada kelas XI dan XII, mereka baru akan memilih mata pelajaran sesuai dengan minatnya dari kelompok mata pelajaran yang tersedia.⁷

Kurikulum Merdeka yang diterapkan di MA Negeri di Kabupaten Pandeglang memiliki karakteristik khusus. Salah satu aspek uniknya adalah pengelolaan kurikulum yang didasarkan pada konsentrasi ilmu pengetahuan umum, dengan menggabungkan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk memberikan dasar kepada siswa agar mereka dapat mempersiapkan diri menghadapi penjurusan di kelas XI di masa yang akan datang. Pengelolaan pembelajaran fokus pada pembentukan nilai karakter siswa dengan penekanan pada pencapaian

⁷ Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Direktorat Kepala Sekolah, *Buku Saku Tanya Jawab Kurikulum Merdeka, Sekretariat KSPSTK* (Jakarta: Kemdikbud, 2022), <https://repositori.kemdikbud.go.id/24917>, 19.

pembelajaran. Selain itu, metode pembelajaran yang diimplementasikan tidak hanya terkait dengan kemajuan teknologi, melainkan juga mendorong peserta didik untuk lebih aktif dalam Process pembelajaran.⁸

Partisipasi peserta didik dalam melibatkan diri dalam Kurikulum Merdeka Belajar akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Ketika peserta didik merasa bahagia selama Process belajar, hal ini dapat menyebabkan mereka menjadi lebih aktif dan berkontribusi lebih signifikan dalam pembelajaran. Dalam situasi kebahagiaan, peserta didik cenderung memiliki tingkat keterlibatan yang lebih tinggi daripada saat mereka tidak merasa bahagia.⁹

Tujuan dari konsep Merdeka Belajar adalah menciptakan suasana yang menyenangkan bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua. "Merdeka Belajar menekankan bahwa Process pendidikan harus menciptakan lingkungan yang membahagiakan." Oleh karena itu, fokus peningkatan harus diberikan pada peran pendidik sebagai elemen kunci dalam keberhasilan Merdeka Belajar, baik dalam hal perkembangan pribadi pendidik itu sendiri maupun peserta didik. Merdeka Belajar tidak hanya merupakan metode di mana pendidik memerdekakan dirinya sendiri

⁸ Mamad, Waawancara dengan kepala MAN 4 pandeglang, (Pandeglang, 2024).

⁹ Wahdina Salim Aranggere, "Implementasi Program Merdeka Belajar Pada Pembelajaran Aqidah Akhlak Dalam Mengembangkan Kreativitas Peserta Didik Di Mts Hidayatul Mubtadi'in Tasikmadu Malang," *VICRATINA: Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 7 No. (2022): 153, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/fai/article/view/17108>.

dalam Process pembelajaran mengajar, tetapi juga menciptakan pengalaman kemerdekaan dan kenyamanan bagi peserta didiknya.

Kurikulum Merdeka adalah suatu pendekatan dalam dunia pendidikan yang memberikan kebebasan yang lebih besar kepada lembaga pendidikan untuk merancang dan mengelola kurikulum sesuai dengan karakteristik siswa dan lingkungan mereka. Tujuan dari kurikulum ini adalah untuk lebih menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan lokal, mendorong siswa agar lebih aktif dalam Process pembelajaran, dan meningkatkan relevansi pendidikan dengan dunia nyata.

Kabupaten Pandeglang, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Banten, memiliki 4 Madrasah Aliyah Negeri yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka, diantaranya MAN 1 Pandeglang dua tahun berjalan, MAN 2 Pandeglang satu tahun berjalan, MAN 3 Pandeglang satu tahun berjalan dan MAN 4 Pandeglang dua tahun berjalan. Akan tetapi belum ada penelitian yang secara komprehensif mengevaluasi implementasi Kurikulum Merdeka di MAN se Kabupaten Pandeglang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana Kurikulum Merdeka diterapkan di MAN di Kabupaten Pandeglang serta dampaknya terhadap kualitas pendidikan di wilayah tersebut.

Berdasarkan keputusan direktur Jendral Pendidikam Madrasah No. 3811 tahun 2022 tentang madrasah pelaksanaa kurikulum merdeka tahun ajaran 2022/2023 di antaranya MAN 1 Pandeglang dan MAN 4 Pandeglang. Sedangkan Berdasarkan keputusan direktur Jendral Pendidikam Madrasah No. 1443 tahun 2023 tentang madrasah pelaksanaa kurikulum merdeka tahun ajaran 2023/2024 di antaranya MAN 2 Pandeglang dan MAN 3 Pandeglang. Berdasarkan surat edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada tanggal 19 April 2022, terdapat tiga kategori implementasi Kurikulum Merdeka jalur mandiri yang dapat dipilih oleh satuan pendidikan. Ketiga kategori tersebut adalah Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi. Dengan mengacu pada pilihan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan, keempat Madrasah Aliyah Negeri yang berada di Pandeglang saat ini memiliki status Mandiri Berubah.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sekolah di MAN 4 Pandeglang yakni: “Kurikulum merdeka ini baru diterapkan pada tahun ajaran 2022/2023. Dan MAN 4 Pandeglang sendiri masuk dalam kategori sekolah Mandiri Berubah yang artinya menerapkan kurikulum merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang disediakan pada satuan pendidikan di kelas 10” (Hasil wawancara dengan Bapak Mamad, M.Ag

pada 4 Maret 2024 di MAN 4 Pandeglang). Memang untuk di Kemenag kurikulum merdeka sendiri baru diterapkan pada tahun ajaran 2022/2023 yang terdiri dari tiga kategori yaitu mandiri belajar, mandiri berubah dan mandiri berbagi dan masih diterapkan pada kelas X”.

Dari hasil wawancara dengan guru di MAN di Kabupaten Pandeglang yakni “Dengan diluncurkannya kurikulum merdeka ini saya sebagai guru masih mempelajari dalam perencanaan pembelajaran terkhusus dalam modul ajar karena terjadinya perubahan kurikulum ini, sehingga harus menyesuaikan dengan cepat perubahan tersebut. Apalagi kurikulum merdeka ini baru diterapkan pada tahun ajaran 2022/2023” (Hasil wawancara dengan Ibu Indah Deden Hidayat, SE. Gr. pada 16 Maret 2024 di MAN 4 Pandeglang).

Secara faktual, terdapat kesulitan yang dihadapi oleh guru dalam membuat perangkat guru. Guru hanya melihat Perangkat pembelajaran sebagai aspek administratif semata, bukan sebagai panduan esensial dalam Process pembelajaran. “Hal ini menyebabkan kurangnya dedikasi dalam penyusunan RPP/modul ajar oleh guru. Selain itu, sering terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, sehingga perencanaan pembelajaran tidak dijadikan sebagai pedoman utama dalam Process pembelajaran. Padahal, perencanaan pembelajaran merupakan elemen

krusial untuk mencapai tujuan pembelajaran”.¹⁰ Saat ini, banyak guru yang terlihat hanya menjalankan kewajiban dalam mengajar tanpa memperhatikan strategi atau metode pengajaran. Bagi mereka, yang utama adalah memastikan peristiwa pembelajaran dapat berlangsung. Pendekatan ini dianggap keliru dan tidak seharusnya diikuti, karena dapat menimbulkan kesan sebagai guru yang malas dan tidak profesional.¹¹

Penelitian ini dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri Se Kabupaten Pandeglang yaitu MAN 1 Pandeglang, MAN 2 Pandeglang, MAN 3 pandeglang dan MAN 4 Pandeglang. Madrasah Aliyah negeri yang ada di Kabupaten Pandeglang yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka mulai tahun ajaran 2022/2023 kepada siswa yang masih duduk dibangku kelas X. Alasan Madrasah menerapkan Kurikulum Merdeka adalah untuk mendukung Visi Misi dan strategi sekolah yang dilakukan oleh pihak madrasah.

Penerapan Kurikulum Merdeka di MAN di Kabupaten Pandeglang diharapkan dapat memfasilitasi siswa berdasarkan tingkat kemampuan mereka dalam menguasai materi melalui program-program yang telah

¹⁰ Revandi Imana Taqvim, M. E. Winarno, and Roesdiyanto Roesdiyanto, “Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, Dan Kesehatan,” *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan* 5, no. 3 (2020): 395, <https://media.neliti.com/media/publications/486814-none-a993c8c5.pdf>.

¹¹ P. Barlian, U. C., Solekah, S., & Rahayu, “Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan,” *Journal of Educational and Language Research*, 1, no. 1 (2022): 1–52, <https://bajangjournal.com/index.php/JOEL/article/view/3015/2154>.

dirancang sesuai dengan Visi Misi sekolah. Dalam Kurikulum Merdeka, guru dan tenaga pendidik memiliki kebebasan tanpa batasan dalam menggali potensi siswa. Process pembelajaran dapat disesuaikan dengan minat dan bakat individu siswa, sehingga program kurikulum ini diharapkan dapat mendukung tercapainya Visi Misi MAN di Kabupaten Pandeglang.

Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kurikulum Merdeka dan mengevaluasi dampaknya pada pendidikan di MAN se Kabupaten Pandeglang, apakah program ini masih bisa di lanjutkan atau di berhentikan, maka penulis mengambil judul penelitian ini yaitu Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka Dengan Model CIPP (*Conteks, Input, Process, Product*) di Madrasah Aliyah Negeri Se- Kabupaten Pandeglan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga dalam perbaikan dan pengembangan sistem pendidikan di tingkat madrasah aliyah negeri, khususnya di wilayah tersebut.

B. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan tinjauan latar belakang yang telah disajikan, penulis berhasil mengidentifikasi sejumlah masalah yang bisa timbul untuk

“implementasi Kurikulum Merdeka” di Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Pandeglang. Beberapa permasalahan tersebut meliputi:

1. Evaluasi Context Pelaksanaan Kurikulum Merdeka kehadiran di Madrasah Aliyah Negeri belum melalui Process evaluasi terkait Context pelaksanaannya di Kabupaten Pandeglang.
2. Evaluasi Input Pelaksanaan Kurikulum Merdeka, aspek-aspek implementasi kurikulum, termasuk inputnya, belum mendapatkan evaluasi yang memadai.
3. Evaluasi Process Pelaksanaan Kurikulum Merdeka, process implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Aliyah Negeri belum menjalani evaluasi menyeluruh untuk menilai efektivitasnya.
4. Evaluasi Product Pelaksanaan Kurikulum Merdeka., hasil atau Product dari pelaksanaan Kurikulum Merdeka masih perlu dinilai dan dievaluasi.
5. Ketidapkahaman atau Keterbatasan Pengetahuan Guru, pemahaman guru mengenai Kurikulum Merdeka terlihat kurang, dan ada kebutuhan untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan mereka.
6. Kurangnya Pelatihan atau Dukungan untuk Guru, kekurangan pelatihan dan dukungan bagi guru dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.

7. Keterbatasan Buku Teks dan Sumber Daya Pendukung, terdapat keterbatasan dalam ketersediaan buku teks, materi ajar, dan sumber daya pendukung yang sesuai dengan Kurikulum Merdeka.
8. Kendala Infrastruktur. Infrastruktur pendidikan, seperti fasilitas kelas dan laboratorium, tidak memadai untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka.
9. Tidak Adanya Dukungan atau Pemahaman Orang Tua. Tidak adanya dukungan atau pemahaman dari orang tua terkait perubahan dalam kurikulum.
10. Kurangnya Keterlibatan Masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka masih minim.
11. Kurangnya Sistem Evaluasi yang Efektif. Tidak tersedianya sistem evaluasi yang efektif untuk mengukur keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka.
12. Keterbatasan Pemantauan dan Penyesuaian Berkelanjutan. Kurangnya pemantauan dan penyesuaian berkelanjutan terhadap kebijakan kurikulum.
13. Kurangnya Penyesuaian Kurikulum Terhadap Kebutuhan Lokal. Kurikulum Merdeka belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan lokal atau karakteristik siswa di Kabupaten Pandeglang.

14. Ketidaksesuaian dengan Kebijakan Pendidikan Lokal. Terdapat ketidaksesuaian antara Kurikulum Merdeka dengan kebijakan pendidikan yang sudah ada di tingkat lokal.
15. Kurangnya Minat Siswa Terhadap Perubahan dalam Kurikulum. Minat atau pemahaman siswa terhadap perubahan dalam Kurikulum Merdeka masih perlu diperhatikan.
16. Tidak Adanya Dukungan Siswa Terhadap Pembelajaran. Siswa belum sepenuhnya mendukung pembelajaran yang diusulkan oleh Kurikulum Merdeka.

C. Fokus Penelitian

Dalam Context penyelenggaraan penelitian mengenai Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka dengan Model CIPP (Context, Input, Process, Product) di Madrasah Aliyah Negeri se-Kabupaten Pandeglang, penekanan pada batasan masalah dirancang untuk memberikan fokus dan kerangka kerja yang lebih terperinci. Berikut adalah batasan-batasan masalah yang akan diaplikasikan dalam kerangka tesis ini:

1. Evaluasi Context Pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Madrasah Aliyah Negeri se-Kabupaten Pandeglang. Penelitian akan terbatas pada analisis mendalam terkait dengan faktor-faktor Context tual yang mempengaruhi implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Aliyah

Negeri, mencakup lingkungan madrasah, pengetahuan guru dan siswa mengenai kurikulum merdeka.

2. Evaluasi Input Pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Madrasah Aliyah Negeri se-Kabupaten Pandeglang. Fokus penelitian akan difokuskan pada evaluasi elemen-elemen input yang digunakan dalam implementasi Kurikulum Merdeka, seperti dokumen kurikulum operasional madrasah, termasuk sumber daya manusia, buku pelajaran, serta sarana prasarana yang mendukung.
3. Evaluasi Process Pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Madrasah Aliyah Negeri se-Kabupaten Pandeglang. Analisis akan terkonsentrasi pada evaluasi Process pelaksanaan Kurikulum Merdeka, menyoroti persiapan pembelajaran, proses pembelajaran dan pelaksanaan P5 dan P2RA, yang meliputi strategi pembelajaran, partisipasi siswa, peran guru, serta fleksibilitas dan adaptabilitas kurikulum terhadap kebutuhan peserta didik.
4. Evaluasi Product Pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Madrasah Aliyah Negeri se-Kabupaten Pandeglang. Penelitian akan memusatkan perhatian pada evaluasi Product atau hasil akhir dari implementasi Kurikulum Merdeka, yang meliputi hasil belajar siswa dan hasil belajar P5 dan P2RA.

D. Rumusan Permasalahan

Perumusan masalah dalam penelitian evaluasi implementasi Kurikulum Merdeka dengan Model CIPP di Madrasah Aliyah Negeri se-Kabupaten Pandeglang membuka jendela luas untuk mendalami berbagai aspek penting terkait implementasi kurikulum tersebut. Beberapa pertanyaan utama yang menjadi fokus penelitian melibatkan evaluasi pada berbagai tahap, dan pertanyaan-pertanyaan ini memberikan gambaran lebih mendalam mengenai evaluasi kurikulum di Madrasah Aliyah Negeri:

1. Sampai dimana evaluasi terhadap Context pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Madrasah Aliyah Negeri se-Kabupaten Pandeglang ?
2. Bagaimana evaluasi terhadap input atau elemen-elemen yang digunakan dalam implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Aliyah Negeri se-Kabupaten Pandeglang ?
3. Bagaimana evaluasi terhadap Process pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Madrasah Aliyah Negeri se-Kabupaten Pandeglang ?
4. Bagaimana evaluasi terhadap Product atau hasil akhir dari pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Madrasah Aliyah Negeri se-Kabupaten Pandeglang?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam rangka Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka dengan Model CIPP (Context, Input, Process, Product) di Madrasah Aliyah Negeri se-Kabupaten Pandeglang dirinci sebagai berikut:

1. Menganalisis Evaluasi Context Pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Madrasah Aliyah Negeri se-Kabupaten Pandeglang. Melalui analisis ini, penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam Context pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Madrasah Aliyah Negeri, mengidentifikasi mengenai lingkungan madrasah, pengetahuan guru dan siswa terkait dengan kurikulum merdeka.
2. Menganalisis Input Pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Madrasah Aliyah Negeri se-Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini akan membahas secara rinci elemen-elemen input yang terlibat dalam implementasi Kurikulum Merdeka, termasuk sumber daya manusia atau guru, buku pelajaran, serta dokumen kurikulum operasional madrasah. Tujuannya adalah memberikan gambaran komprehensif tentang fondasi dan elemen-elemen kunci yang mendukung kurikulum.
3. Fokus penelitian akan mencakup analisis mendalam mengenai bagaimana Process pelaksanaan Kurikulum Merdeka berlangsung di Madrasah Aliyah Negeri se-Kabupaten Pandeglang. Ini

mencakup Persiapan pembelajaran, Pelaksanaan Pembelajaran dan Pelaksanaan P5 dan P2RA yang meliputi strategi pembelajaran, partisipasi siswa, peran guru, dan adaptabilitas kurikulum terhadap kebutuhan peserta didik.

4. Menganalisis Product Pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Madrasah Aliyah Negeri se-Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini akan memaparkan hasil atau Product akhir yang dihasilkan dari implementasi Kurikulum Merdeka, berupa hasil belajar siswa dan hasil Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dan Profil Pelajar Rohmatan Lil'alamin (P2RA.) Tujuannya adalah memberikan pemahaman mendalam tentang sejauh mana kurikulum ini berhasil mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dikembangkan lebih luas sebagai berikut:

1. Secara Teoritis : Penelitian ini secara teoritis dapat dijadikan sebagai landasan referensi bagi penelitian-penelitian mendatang yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum mandiri. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya

pengetahuan, memperluas pemahaman, dan memberikan wawasan baru terhadap konsep kurikulum mandiri. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi perkembangan konsep kurikulum di tingkat nasional.

2. Secara Praktis : Bagi guru, hasil penelitian akan membantu mereka mencapai tujuan kurikulumnya sendiri, memperluas pengetahuan, pemahaman dan pengalamannya, serta membantu guru menerapkan kurikulumnya sendiri dalam Process pembelajaran di sekolah dasar. informasi untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan. Hasil penelitian akan memberikan bahan evaluasi dan informasi yang berguna bagi sekolah untuk memperbaiki dan mengembangkan kurikulumnya sendiri, serta dapat juga menjadi acuan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan kurikulum.

G. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu terkait dengan evaluasi implementasi kurikulum merdeka adalah sebagai berikut :

1. Azhar, Tesis Evaluasi Program Pelaksanaan Kurikulum 2013 Dengan Model Cipp (*Conteks, Input, Process, Product*) di MTs, IAIN Palangka Raya, 2020, Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami implementasi Kurikulum 2013 dengan menerapkan

model CIPP, yang melibatkan aspek Context (Context), Input (Masukan), Process (Process), dan Product (Product). Penelitian evaluatif ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif, dan subjek penelitian terdiri dari kepala madrasah, wakil kepala madrasah, guru, serta tata usaha dan siswa yang berperan sebagai informan. Metode pengumpulan data melibatkan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Keabsahan data diuji dengan ketekunan pengamatan dan menggunakan triangulasi melibatkan sumber data, metode, dan teori. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Meskipun penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya dalam menggunakan model evaluasi CIPP, perbedaannya terletak pada fokus kurikulum dan lokasi penelitian yang berbeda

2. Syanila Indah Mawardani, Tesis Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Pembelajaran Sejarah Di SMA Negeri 5 Bandar Lampung Tahun ajaran 2022/2023, Universitas Lampung, 2023. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa guru mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 5 Bandar Lampung telah berhasil mengimplementasikan kurikulum 2013 pada tahun ajaran 2022/2023. Implementasi ini tergambar dalam perencanaan pembelajaran yang mencakup Capaian Pembelajaran (CP), Tujuan

Pembelajaran (TP), dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP). Selain itu, modul ajar yang telah disusun juga telah sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 262/M/2022. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tujuan, lokasi penelitian, dan hasil yang ditemukan.

3. Anis Rahmiwati, tesis “Evaluasi Pembelajaran Jarak Jauh Dengan Menggunakan Model CIPP”, tahun 2022. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh dari kedua sekolah tersebut sudah baik, namun bila ditinjau dari beberapa aspek model CIPP di dua sekolah ini dapat dikembangkan lebih baik lagi dengan metode - metode kegiatan pembelajaran jarak jauh juga pembaruan dari beberapa aspeknya terutama aspek input dan aspek Process. Perbedaan pada penelitian ini adalah variabel penelitiannya yaitu kurikulum merdeka di Madrasah Aliyah.
4. Margi Jayanti, tesis Implementasi Manajemen Kurikulum Merdeka Belajar (Studi Kasus di SMPN 1 Trimurjo). Tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dalam perencanaan, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan telah dirancang dengan mengacu pada prinsip-prinsip merdeka belajar, dan telah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik; (2) Pengorganisasian

dilakukan kepala sekolah dengan membentuk koordinator, membuat surat keputusan dan membagikan tugas yang melibatkan wali kelas dan guru, membuat deskripsi pelaksanaan tugas,, mendistribusikan tugas kepada stakeholder; guru membantu kepala sekolah dalam merancang, melaksanakan dan membantu berjalannya program; komite sekolah memberikan masukan dalam merumuskan dan menetapkan pedoman struktur organisasi sekolah, melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program; (3) Dalam pelaksanaan, belum semua guru memahami prinsip-prinsip merdeka belajar, sumber belajar masih berpusat pada guru, seharusnya berpusat pada siswa dengan guru sebagai fasilitator. Dalam pembelajaran, sebagian masih menerapkan pembelajaran kurikulum yang sama dengan sebelumnya, semestinya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi; (4) Pengawasan dilakukan secara langsung melalui kegiatan supervisi, pemantauan, dan pengontrolan. Supervisi dilakukan 2 kali dalam setahun, evaluasi akhir kurikulum baru dilakukan satu kali, oleh karena itu perlu adanya kegiatan evaluasi secara terus menerus walaupun hasilnya sudah menunjukkan cukup baik dan perlu pengembangan yang maksimal. Berbeda dengan penelitian ini terletak pada variable dan lokasi penelitian.

5. Yuniati, tesis Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak Kabupaten Kuantan Singingi. Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, secara umum SMP Negeri Kuantan Singingi telah menjalankan kurikulum merdeka sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu melakukan pembelajaran sesuai dengan struktur kurikulum dalam kurikulum merdeka, juga telah melakukan penilaian secara komprehensif. Kedua, faktor atau variable yang mempengaruhi pelaksanaan manajemen kurikulum merdeka di sekolah penggerak pada SMP Negeri Kuantan Singingi adalah kepala sekolah, guru, dan sarana-prasarana belajar sekolah. Perbedaan dengan penelitian ini sangat jauh dari variabel dan yang lainnya.
6. Elmer A Irene dalam jurnalnya yang berjudul Evaluation of Teacher Education Curricula and its relevance to licensure examination using Context, Input, Process and Product (CIPP) model, tahun 2023. hasil penilitain menunjukkan bahwa Berdasarkan pengalaman dan sudut pandang siswa-peserta, ada beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan kurikulum dalam hal relevansinya dengan ujian lisensi. Evaluasi terungkap ketidaksesuaian dan ketidaksesuaian urikulum dengan ujian profesi. Disarankan agar sebuah Kurikulum yang efektif harus

memastikan bahwa lulusan mahasiswa dapat bergantung pada kontennya untuk menghalangi perizinan kompetensi ujian. Oleh karena itu, untuk mempertahankan relevansinya, hal ini memerlukan peningkatan kurikulum secara terus-menerus melibatkan dosen dan mahasiswa. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada variable kurikulum nya.

7. Anchal Kapoor dalam jurnalnya berjudul “Implementation Of The Cipp Model To Evaluate A Leadership And Quality Improvement Curriculum For Trainees”. Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan Evaluasi Context program mengungkapkan bahwa rekan-rekan dan dosen tidak terbiasa dengan prinsip-prinsip panduan kursus. Evaluasi masukan menyoroti persaingan kepentingan yang menghambat keterlibatan rekan-rekan selama laporan mingguan malam hari. Evaluasi Process mengungkapkan pengelompokan sesi didaktik di awal kursus. Evaluasi Product menekankan kesulitan menyelesaikan proyek QI dalam jangka waktu yang ditentukan. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pana variable kutikulumnya serta objeknya.
8. Ayu Puspita sari dalam jurnalnya Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka Menggunakan Model CIPP di SD Bontang. Tahun 2023. Hasil penelitiannya menunjukkan memperlihatkan

bahwa (1). Implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar sudah berjalan cukup efektif dan efisien walaupun dalam segi pelaksanaannya masih belum maksimal; (2). Hambatan dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka adalah sistem penilaian asesmen yang berkelanjutan dan metode pembelajaran yang menyenangkan; (3). Beberapa strategi yang dapat diupayakan oleh guru dalam mengatasi hambatan yaitu (a) mendesain pembelajaran yang menyenangkan dan berbasis *game education*; (b). pelatihan mandiri berbasis online dan bimbingan teknis tentang implementasi Kurikulum Merdeka. Perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu Madrasah Aliyah dan tempat penelitian.

9. Huldiya Syamsiar dalam jurnalnya Evaluasi Kurikulum Merdeka Belajar Berbasis CIPP, tahun 2023, menunjukkan Hasil dari penelitian menggunakan Evaluasi CIPP melibatkan analisis terhadap Context implementasi kurikulum, sumber daya yang digunakan (input), Process implementasi kurikulum, dan Product yang dihasilkan. Melalui evaluasi ini, diperoleh pemahaman komprehensif tentang bagaimana kurikulum Merdeka Belajar diimplementasikan, termasuk Context nya, sumber daya yang dimanfaatkan, Process pelaksanaannya, dan hasil atau Product yang dihasilkan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian

sebelumnya terletak pada fokus obyek penelitian dan absennya informasi mengenai lokasi penelitian.

H. Kebaruan Penelitian (Novelty)

Meskipun banyak penelitian telah mendalami Penerapan Kurikulum Merdeka, setiap daerah memiliki ciri khasnya sendiri terkait tema tersebut. Namun, belum ada penelitian secara khusus di Kabupaten Pandeglang yang mengevaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Aliyah dengan menggunakan model program CIPP. Akan tetapi penelitian sebelumnya sudah ada terkait pembahasan mengenai evaluasi kurikulum 2013 dengan program CIPP. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan untuk penelitian lebih lanjut di masa mendatang